

Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Kompak Safari Ramadan, Ini Pesannya

Sultranet.com, Lasusua - Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara melanjutkan Safari Ramadan hari kedelapan dengan mengunjungi dua kecamatan, yakni Kodeoha dan Porehu, pada Kamis, 20 Maret 2025.

Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nur Rahman Umar, MH., menghadiri kegiatan di Masjid Raya Mala-mala, Kecamatan Kodeoha, sementara Wakil Bupati, H. Jumarding, SE., melaksanakan safari di Masjid Raya Bangsala, Kecamatan Porehu.

Dalam sambutannya, Bupati Nur Rahman Umar menegaskan pentingnya merajut kembali persatuan pasca-Pilkada. Ia mengajak masyarakat untuk menghilangkan sekat-sekat perbedaan politik demi kemajuan Kolaka Utara.

“Kita baru saja melalui proses demokrasi dalam Pilkada. Kini saya dan H. Jumarding telah diberi amanah sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara. Riak-riak demokrasi yang terjadi kemarin telah selesai, kini saatnya kita bersatu untuk membangun Kolaka Utara,” ujarnya.

Bupati juga menekankan bahwa tantangan ke depan semakin kompleks, terutama terkait kondisi ekonomi global yang tidak stabil. Namun, ia optimistis dengan persatuan dan gotong royong, Kolaka Utara dapat menghadapi berbagai tantangan.

“Tantangan ke depan semakin besar, termasuk pengaruh rivalitas negara asing yang bisa berdampak pada ekonomi kita. Namun, jika kita bersatu, kita bisa menghadapi dan mengatasinya bersama,” katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati H. Jumarding dalam kesempatan di Masjid Raya Porehu mengajak masyarakat menjadikan Ramadan sebagai momentum meningkatkan keimanan dan mempererat silaturahmi.

“Mari kita manfaatkan bulan suci ini untuk mempererat kembali silaturahmi yang mungkin sempat renggang. Dengan persatuan dan kebersamaan, kita bisa

membawa Kolaka Utara ke arah yang lebih baik,” tuturnya.

Safari Ramadan ini turut dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Kegiatan ini menjadi ajang bagi pemerintah daerah untuk lebih dekat dengan masyarakat serta menyerap aspirasi demi kemajuan Kolaka Utara.

Dalam tausiyah tarawih yang disampaikan oleh Syamsuddin Ribi, S.Pd., di Masjid Raya Mala-mala, disinggung tentang pentingnya menjadikan Ramadan sebagai momentum introspeksi diri dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT.

“Ramadan bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga sebagai titik balik untuk membangun silaturahmi dan memperkuat persatuan di tengah masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa Lailatul Qadar yang diyakini turun pada malam-malam ganjil di sepuluh hari terakhir Ramadan harus dijadikan sebagai motivasi untuk semakin giat beribadah.

Sementara itu, Kepala Bidang IKP dan Humas Diskominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, SH., menyampaikan bahwa Safari Ramadan menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah dalam mempererat hubungan dengan masyarakat.

“Ini adalah momen yang sangat baik bagi pemerintah untuk bersilaturahmi langsung dengan masyarakat. Dengan kegiatan ini, pemerintah dapat mendengar langsung aspirasi warga serta memberikan pesan-pesan pembangunan yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Kolaka Utara,” singkatnya.

Pembinaan Statistik Sektoral

2025, Sultra Perkuat Implementasi Satu Data Indonesia

Kendari, sultranet.com - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Pembinaan Statistik Sektorial Tahun 2025 guna memperkuat implementasi Satu Data Indonesia (SDI) di daerah. Kegiatan yang berlangsung di Aula Utama Lantai 4 Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Sultra ini dibuka secara virtual oleh Wakil Gubernur Sultra, Ir. Hugua, M. Ling., melalui Zoom Meeting pada Kamis, 20 Maret 2025.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Hugua mengapresiasi sinergi antara BPS, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sultra, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam mengintegrasikan berbagai data sektorial. Menurutnya, pengelolaan data yang akurat dan mutakhir sangat penting dalam meningkatkan kualitas pembangunan daerah.

“Saya berharap dengan sinergi ini, data sektorial kita semakin berkualitas. Dalam 100 hari pertama Quick Win ASR-Hugua, kita harus mulai membangun dasar-dasar penting untuk sistem satu data ini. Paling tidak, pada akhir 2025 nanti, peringkat Sulawesi Tenggara yang saat ini berada di posisi keenam bisa meningkat ke level yang lebih baik,” ujar Hugua.

Ia menekankan bahwa sinergitas yang kuat antar instansi akan menjadi kunci keberhasilan implementasi Satu Data Indonesia di Sulawesi Tenggara. Selain itu, data yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan akan membantu perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Sultra, Dr. M. Ridwan Badallah, S.Pd., M.M., menegaskan bahwa pembinaan statistik sektorial menjadi bagian penting dalam Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Statistik (EPSS). Menurutnya, nilai EPSS Sultra tahun lalu mencapai 2,9 dan harus terus ditingkatkan.

“Implementasi Perpres Satu Data Indonesia di Sultra hingga saat ini masih belum maksimal. Oleh karena itu, saya berharap OPD, walidata, dan sekretariat forum dapat bekerja sama dalam membangun data sektorial yang lebih baik. Satu Data menjadi salah satu program 100 hari Gubernur dan Wakil Gubernur, yang harus menjadi penguat bagi kita semua untuk bekerja lebih optimal,” kata Ridwan.



Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Menurutnya, setiap data publik yang dimiliki pemerintah daerah harus dipublikasikan secara umum agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Bappeda, serta 18 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi target pembinaan statistik sektoral. Di antaranya adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, serta Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Di akhir acara, Wakil Gubernur Hugua secara resmi membuka kegiatan secara virtual dan mengajak seluruh OPD untuk berkolaborasi dalam membangun sistem data yang lebih baik. Ia berharap sinergi yang terjalin dapat memberikan manfaat besar bagi pembangunan daerah.

Kolaka Utara Gencarkan Aksi Bersih, Sukseskan Program 100 Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati

Lasusua, sultranet.com - Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat terus mengencarkan aksi kebersihan dalam rangka mempertahankan predikat sebagai daerah kecil terbersih di Indonesia. Kamis (20/3), aksi bersih digelar di Masjid Agung Lasusua dengan melibatkan 100 petugas kebersihan. Kegiatan ini dihadiri oleh Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kolaka Utara, Patehuddin, SH, serta sejumlah pejabat daerah lainnya.

Aksi ini merupakan bagian dari program kerja 100 hari Bupati dan Wakil Bupati Kolaka, Drs. Nur Rahman Umar, SH, dan H. Jumardin, SE, yang menargetkan percepatan kebersihan Kota Lasusua. Langkah ini diambil sebagai persiapan menghadapi penilaian Adipura sekaligus mengembalikan kejayaan Kolaka Utara yang telah tujuh kali meraih trofi Adipura sebagai daerah kecil terbersih.



Patehuddin menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung Gerakan Nasional Indonesia Bersih yang dicanangkan Presiden RI.

“Gerakan Nasional Indonesia Bersih yang dicanangkan Presiden RI ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara melalui aksi bersih. Kami melakukan pembersihan di berbagai area yang telah ditentukan untuk memastikan lingkungan tetap bersih dan nyaman bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa kebersihan lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat.

“Kami mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan. Ini bukan hanya tentang Adipura, tetapi juga demi kesehatan dan kenyamanan kita bersama,” tambahnya.

Kabid IKP dan Humas Diskominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, SH, mengapresiasi langkah cepat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kolaka Utara dalam merespons program nasional ini.

“Kami sangat mengapresiasi respons cepat DLH Kolaka Utara dalam

menindaklanjuti Gerakan Nasional Indonesia Bersih. Langkah ini menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga kebersihan lingkungan, khususnya dalam mendukung program kerja 100 hari bupati dan wakil bupati,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

“Kesadaran dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam menjaga kebersihan lingkungan. Upaya ini tidak hanya untuk mempertahankan predikat kota kecil terbersih, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan sehat bagi generasi mendatang,” tambahnya.

Dengan adanya aksi bersih ini, Pemkab Kolaka Utara berharap tidak hanya mempertahankan predikat kota kecil terbersih, tetapi juga meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya kebersihan. Program serupa akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

Penulisan Mushaf Nusantara, Sekda Sultra Dorong Pelestarian Seni dan Budaya Islam

KENDARI, sultranet.com - Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sekaligus Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ), Drs. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., menghadiri secara virtual kegiatan Penulisan Mushaf Nusantara yang dilaksanakan serentak di 29 provinsi di Indonesia, Rabu, 19 Maret 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Semarak Ramadan yang diinisiasi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk memperkuat literasi baca-tulis Al-Qur'an serta melestarikan seni dan budaya Islam Nusantara.

Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama RI sekaligus Sekretaris MTQ Nasional, Ahmat Zayadi, M.Pd., dalam sambutannya menegaskan bahwa

Penulisan Mushaf Nusantara bukan sekadar proyek penulisan, tetapi juga menjadi bagian dari program prioritas Kementerian Agama dalam meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan.

“Kegiatan ini bukan hanya menulis mushaf, tetapi juga memperkuat ekosistem pendidikan Al-Qur’an di Indonesia. Dengan melibatkan para juara Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ), kita ingin memastikan bahwa Al-Qur’an tidak hanya dibaca, tetapi juga ditulis dan dipahami dengan baik oleh masyarakat luas,” ujar Ahmat Zayadi.

Ia juga menekankan bahwa aspek seni dan budaya menjadi bagian penting dalam penulisan Mushaf Nusantara. Mushaf yang dihasilkan nantinya akan menampilkan corak khas budaya Indonesia melalui iluminasi dan ragam hias kaligrafi yang mencerminkan kekayaan seni Islam di Nusantara.

“Ke depan, kita ingin Mushaf Nusantara tidak hanya dikenal dari segi isinya, tetapi juga dari segi seni dan budaya yang menjadi bagian dari identitas Islam di Indonesia. Inilah bentuk nyata bagaimana agama dan budaya bisa berjalan seiring dalam membangun peradaban yang lebih maju,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekda Sultra Drs. Asrun Lio memberikan apresiasi kepada para peserta terbaik dari Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah berprestasi dalam MTQ VIII Korpri Tingkat Nasional 2024 di Kalimantan Tengah.

“Kami bangga dengan pencapaian ini. Prestasi ini menjadi bukti nyata bahwa Sulawesi Tenggara memiliki potensi besar dalam bidang literasi Al-Qur’an dan seni kaligrafi Islam,” kata Asrun Lio.

Berikut daftar peserta terbaik dari Sulawesi Tenggara:

- Lalu Suharja Hambali, S.Pd.I., M.Pd. (Juara I Cabang Hifzh Al-Qur’an Golongan Surah An-Nisa) - Dinas Pendidikan Kota Baubau.
- Dr. Danial, Lc., M.Th.I. (Juara I Cabang Dakwah Al-Qur’an Kategori Da’i) - IAIN Kendari.
- Sitti Syahali, S.Pd. (Harapan III Cabang Dakwah Al-Qur’an Kategori Da’iyah) - Kantor Pemda Buton Utara.
- H. Syafuddin Mustaming, S.Ag., MA (Juara III Cabang Khutbah Jumat) - Kantor Kesra Pemda Kolaka.
- Syamsu Alam (Harapan I Cabang Hifzh Al-Qur’an Golongan 7 Surah

Pilihan) - Kemenag Kolaka Utara.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sultra, H. Muhamad Saleh, yang turut hadir secara virtual, mengungkapkan bahwa progres penulisan Mushaf Nusantara di Sulawesi Tenggara berjalan dengan baik dan melibatkan delapan peserta dari berbagai kabupaten.

“Kegiatan ini mencerminkan kolaborasi erat antara LPTQ, Kementerian Agama, serta para pegiat seni kaligrafi Islam. Kami berkomitmen untuk terus mengembangkan tradisi keislaman berbasis budaya lokal,” ujar Muhamad Saleh.

Penulisan Mushaf Nusantara di Sulawesi Tenggara diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Qur'an serta memperkuat identitas Islam di Indonesia melalui karya seni yang bernilai tinggi.

Bupati Bombana dan DPRD Sultra Tinjau TPI, Dorong Pengelolaan Diserahkan ke Pemkab

BOMBANA, sultranet.com - Pemerintah Kabupaten Bombana bersama anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan monitoring sarana prasarana dan sistem pengelolaan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Bombana. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan optimalisasi pengelolaan fasilitas perikanan guna mendukung kesejahteraan nelayan. Monitoring tersebut berlangsung di TPI Bombana pada Rabu, 19 Maret 2025.

Bupati Bombana, Ir. Burhanuddin, M.Si, bersama enam anggota DPRD Sultra, yaitu Syahrul Said, S.Sos, H. Uking Djassa, SH, Tya Roysman, S.M, Achmad Aksar, SH, Yusman Fahim, dan Hj. Hatija, turut hadir dalam kunjungan tersebut. Dinas Perikanan Kabupaten Bombana dan Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara juga ikut serta dalam agenda tersebut.

Dalam tinjauan tersebut, ditemukan bahwa kondisi fasilitas di TPI Bombana masih

belum memadai untuk menampung hasil tangkapan nelayan yang mencapai 29 ton per tahun. Selain itu, fasilitas pendingin (cool storage) mengalami kerusakan sehingga menghambat proses penyimpanan ikan.

“Fasilitas di TPI ini harus segera diperbaiki agar bisa lebih maksimal dalam mendukung aktivitas nelayan. Jika aset ini bisa diberikan ke pemerintah daerah, kami siap membangunnya,” ujar Bupati Burhanuddin.

Menurutnya, TPI Bombana masih berstatus aset milik Pemerintah Provinsi Sultra. Meski demikian, hingga saat ini belum ada intervensi dari provinsi terkait perbaikan fasilitas tersebut. Oleh karena itu, Pemkab Bombana bersama DPRD Sultra akan berkoordinasi untuk mencari solusi terbaik.

Selain itu, Bupati Burhanuddin menyampaikan komitmennya untuk menambah panjang tambat labuh kapal jika pengelolaan TPI diserahkan kepada pemerintah daerah.

“Kalau pengelolaan TPI ini diberikan ke Pemkab Bombana, kami akan menambah panjang tambat labuh kapal agar seluruh kapal nelayan dari wilayah Lampopala dan sekitarnya bisa ditata dengan lebih rapi. Ini juga penting untuk menata tata kota agar lebih baik lagi,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Sultra, Tya Roysman menegaskan bahwa pihaknya siap memperjuangkan dan membantu mengkomunikasikan kepada pihak Pemprov Sultra agar fasilitas di TPI Bombana bisa segera diperbaiki sekaligus memperjuangkan agar diserahkan pengelolaannya ke Pemkab Bombana.

“Kami dari DPRD Provinsi siap membantu dan memfasilitasi percepatan perbaikan fasilitas di TPI ini,” tegas Tya Roysman.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bombana, Ir. Muhammad Siarah, M.Si, menambahkan bahwa pihaknya akan terus mengawal proses rencana pengalihan pengelolaan TPI ini agar segera terealisasi.

“Sesuai informasi Insya Allah dalam bulan April hingga Mei mendatang TPI sudah mulai dilakukan perbaikan. Dengan adanya dukungan dari DPRD Provinsi dan Pemkab Bombana, kami optimis fasilitas TPI bisa lebih optimal dalam mendukung sektor perikanan daerah,” ungkap Muhammad Siarah.

Pemantauan ini merupakan bagian dari upaya sinergi antara pemerintah daerah

dan legislatif dalam meningkatkan pengelolaan hasil perikanan di Bombana. Selain mendukung peningkatan ekonomi nelayan, optimalisasi TPI juga diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan berbasis sektor kelautan dan perikanan.

Pemkab Muna Gelar Gerakan Pangan Murah Jelang Idul Fitri

Muna, sultranet.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah sebagai langkah menstabilkan pasokan dan harga pangan serta mengendalikan inflasi daerah selama periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) bulan puasa dan Idul Fitri 1446 H. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Kegiatan tersebut berlangsung di pelataran Kantor Kecamatan Kabupaten Muna, Rabu (19/3/2025), dan diawali dengan Zoom Meeting yang diikuti oleh 17 kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara.

Bupati Muna, Drs. Bachrun, M.Si., hadir langsung dalam acara tersebut, didampingi sejumlah pejabat daerah. Program ini merupakan inisiatif pemerintah pusat yang diterapkan di daerah untuk membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga bahan pokok selama bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri.

Gerakan Pangan Murah ini menyediakan berbagai bahan pokok dengan harga lebih rendah dari Harga Eceran Tertinggi (HET). Program ini terselenggara berkat kerja sama Pemkab Muna dengan Bulog dan sejumlah distributor bahan pangan, sehingga selisih harga yang diberikan kepada masyarakat bisa mencapai Rp3.000 hingga Rp5.000 lebih murah dibanding harga pasar.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Muna, Ir. Movik, menjelaskan bahwa bahan kebutuhan pokok yang dijual dalam program ini berasal dari kerja sama dengan rekanan Bulog dan distributor lokal yang telah diseleksi oleh pemerintah daerah.

“Dengan kegiatan ini, mudah-mudahan masyarakat dapat terbantu. Sebab, harga

yang kami tawarkan lebih rendah dari HET dengan selisih antara Rp3.000 hingga Rp5.000,” ujar Movik.

Sementara itu, Bupati Muna, Drs. Bachrun, M.Si., menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menekan kenaikan harga dan memastikan masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka tanpa beban berlebih.

“Kita berharap bahwa kegiatan ini dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya,” kata Bupati Bachrun.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa program ini tidak hanya bertujuan untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat tetapi juga menjaga daya beli di tengah meningkatnya permintaan selama HBKN.

“Dengan adanya Gerakan Pangan Murah ini, diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaatnya dan dapat membantu mengurangi beban keuangan selama periode HBKN,” pungkasnya.

Masyarakat yang hadir dalam kegiatan ini menyambut baik langkah pemerintah daerah. Mereka mengaku terbantu dengan adanya harga yang lebih murah dibanding harga pasar, terutama di tengah situasi ekonomi yang kerap mengalami gejolak menjelang hari raya.

Dengan adanya Gerakan Pangan Murah ini, Pemkab Muna berharap masyarakat bisa menjalani bulan suci Ramadhan dan merayakan Idul Fitri dengan lebih tenang tanpa khawatir terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok.

Pewartu: Borju

Pemkab Kolaka Utara Jaga

Stabilitas Harga Bahan Pokok Jelang Idul Fitri

Kolaka Utara, sultranet.com - Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menggelar Gerakan Pangan Murah untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idul Fitri 1446 H. Program ini diadakan untuk memastikan masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau di tengah meningkatnya permintaan selama bulan suci. Rabu (19/3/2025)

Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, SE, ini juga terpantau langsung oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Zoom Meeting. Gerakan ini merupakan bagian dari program serentak yang dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara guna menekan lonjakan harga bahan pokok dan mengantisipasi inflasi.

Dalam sambutannya, H. Jumarding menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga stabil.

“Dengan adanya Gerakan Pangan Murah ini, kami berharap masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka dengan harga yang lebih terjangkau. Pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas harga pangan agar tidak terjadi lonjakan yang memberatkan masyarakat,” ujar Wakil Bupati.

Gerakan Pangan Murah ini menyediakan berbagai komoditas utama, seperti beras, minyak goreng, gula pasir, telur, dan tepung terigu, dengan harga subsidi atau lebih rendah dari harga pasar. Program ini terselenggara berkat kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, distributor pangan, Bulog, serta para pelaku usaha lokal guna memastikan ketersediaan stok pangan tetap aman hingga Idul Fitri.

Kepala Bidang IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan kelancaran program ini dan agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

“Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus menjalankan program strategis seperti ini guna memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terjangkau. Gerakan Pangan Murah ini merupakan salah satu upaya konkret dalam menstabilkan harga dan mengurangi beban ekonomi masyarakat menjelang hari raya,” jelas Syahlan Launu.

Masyarakat Kolaka Utara menyambut baik program ini, karena dianggap sangat membantu di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok yang kerap terjadi menjelang Idul Fitri.

Dengan adanya Gerakan Pangan Murah ini, diharapkan masyarakat dapat menjalani ibadah puasa dan merayakan Idul Fitri dengan lebih tenang tanpa kekhawatiran terhadap lonjakan harga bahan pokok.

Terduga Pesta Narkoba di Bombana Dicidad TNI, Dipulangkan Polisi

Bombana, sultranet.com - Kodim 1431/Bombana berhasil menggagalkan pesta narkoba di Desa Teppoe, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, pada Minggu (16/3/2025). Dalam penggerebekan yang dipimpin oleh Dan Unit Intel Kodim 1431/Bombana, Lettu Inf Nyoman Admika, dua orang diamankan beserta sejumlah barang bukti.

Dua orang yang ditangkap adalah Ja (32), seorang petani asal Desa Laea, Kecamatan Poleang Selatan, dan RH (24), seorang wiraswasta asal Desa Teppoe, Kecamatan Poleang Timur. Penggerebekan dilakukan setelah tim intelijen Kodim 1431/Bombana menerima informasi dari warga terkait aktivitas mencurigakan di rumah seorang bandar narkoba berinisial T. Setelah pengintaian, tim TNI melakukan penggerebekan, tetapi tiga orang, termasuk T, berhasil melarikan diri.

Barang bukti yang ditemukan dalam operasi ini antara lain 15 sachet sabu-sabu

seberat 14,97 gram, satu alat timbang digital, dua bal plastik klip, dua sendok pipet, satu korek gas, serta empat unit ponsel. Selain itu, petugas juga menyita uang tunai sebesar Rp3,4 juta yang diduga hasil transaksi narkoba.

Pada Senin (17/3/2025), Kodim 1431/Bombana menyerahkan kedua terduga pelaku ke Polres Bombana untuk diproses lebih lanjut. Namun, keesokan harinya, Selasa (18/3/2025), pihak kepolisian mengembalikan mereka dengan alasan tidak ditemukan bukti kuat yang mengaitkan keduanya dengan barang bukti narkoba yang disita di lokasi penggerebekan.

Kasat Resnarkoba Polres Bombana, AKP Muh. Arman, S.H., M.H., menjelaskan bahwa pihaknya hanya menerima dan memeriksa dua orang yang diamankan oleh TNI tanpa melakukan upaya paksa penangkapan. "Kami tidak pernah melepaskan terduga pelaku karena sejak awal mereka bukan hasil penangkapan kami. Setelah diperiksa, kami tidak menemukan keterlibatan mereka dengan barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian," ujarnya.

Lebih lanjut, AKP Muh. Arman menambahkan bahwa dalam proses penyelidikan, kedua orang tersebut hanya berada di tempat kejadian perkara tanpa ada bukti keterlibatan langsung dengan narkoba yang diamankan. "Karena tidak cukup bukti, kami memulangkan mereka sesuai prosedur hukum yang berlaku," jelasnya.

Sementara itu, Komandan Kodim (Dandim) 1431/Bombana, Letkol Inf Andi Irfandi, S.I.P., mengatakan bahwa pihaknya menghormati keputusan Polres Bombana dalam menangani kasus ini. "Kami memahami bahwa kepolisian memiliki prosedur dan aturan sendiri dalam menentukan status hukum seseorang. Namun, sebagai bagian dari aparat negara, TNI tetap berkomitmen untuk memberantas peredaran narkoba di wilayah Bombana," tegasnya.

Letkol Inf Andi Irfandi menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan pihaknya sejalan dengan perintah Presiden selaku Panglima Tertinggi TNI untuk membantu penegakan hukum dalam pemberantasan narkoba. "TNI diperintahkan untuk membantu menangani masalah penyalahgunaan narkoba demi menyelamatkan generasi bangsa. Kami akan terus bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menekan angka peredaran narkoba, terutama di Bombana yang angka kasusnya cukup tinggi," katanya.

Dilansir dari Kompas.com (18/3), DPR dan pemerintah terus melanjutkan

pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Sejumlah perubahan disepakati, di antaranya mencoret usulan mengenai peran TNI Kementerian Kelautan dan Perikanan serta bantuan penanganan penyalahgunaan narkoba. Kedua usulan peran baru ini menuai kritik dari masyarakat sipil karena dinilai tidak berhubungan dengan tugas dan fungsi TNI.

Pencoretan itu disepakati dalam rapat Panitia Kerja RUU Perubahan atas UU TNI Komisi I DPR (Panja RUU TNI) dan pemerintah dalam rapat, Senin (17/3/2025) malam. "Awalnya dalam RUU TNI, pemerintah mengusulkan tiga tugas baru. Namun, saat ini hanya tinggal dua usulan," kata anggota Panja RUU TNI Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin, Selasa (18/3/2025).

Tiga tugas baru itu mulanya diusulkan ditambahkan dalam Pasal 7 yang mengatur mengenai operasi militer selain perang (OMSP). Ketiga usulan itu adalah TNI memiliki tugas membantu dan menanggulangi ancaman siber, TNI bisa membantu dan menyelamatkan WNI dan kepentingan nasional di luar negeri, dan TNI memiliki wewenang untuk membantu menangani masalah penyalahgunaan narkoba.

"Untuk TNI memiliki wewenang untuk membantu menangani masalah penyalahgunaan narkoba itu sudah dihilangkan," kata Hasanuddin.

Dengan demikian, tugas TNI dalam OMSP yang pada UU No 34/2004 diatur sebanyak 14 urusan, hingga Selasa ini, disepakati menjadi 16 urusan.

Bukan hanya itu, Pasal 47 yang mengatur mengenai kementerian dan lembaga sipil yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif juga diputuskan berubah dari kesepakatan semula saat rapat konsinyering akhir pekan lalu. Sebelumnya, Panja RUU TNI DPR dan pemerintah sepakat menambah enam kementerian/lembaga baru yang dapat diisi oleh prajurit aktif. Penambahan itu membuat prajurit TNI dapat ditempatkan di 16 kementerian/lembaga.

Namun, kata Hasanuddin, rapat panja terakhir memutuskan untuk menghapus usulan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai institusi sipil yang dapat diisi oleh prajurit TNI. "Jadi, yang sebelumnya diusulkan total 16 kementerian/lembaga, terakhir saat ini hanya menjadi 15. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) itu dihapus," katanya.

Jelang Idul Fitri, Pemprov Sultra Gelar Gerakan Pangan Murah

Kendari, sultranet.com - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) guna menstabilkan pasokan dan harga pangan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri. Acara ini dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Sultra, Ir. Hugua, M.Lig, bersama Ny. Ratna Lada Hugua di Pelataran Eks MTQ Kendari, Rabu (19/03/2025).

GPM dilaksanakan serentak di 17 kabupaten/kota se-Sultra dan disiarkan langsung dari 22 titik melalui Stasiun TVRI Pusat Senayan serta 21 Stasiun TVRI Daerah. Hadir dalam kegiatan ini Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional RI, Maino Dwi Hartono, S.T.P., M.P., Forkopimda Provinsi Sultra, perwakilan Bank Indonesia Sultra, Kepala BPS, Pimpinan Wilayah Bulog, serta para kepala OPD lingkup Pemprov Sultra dan kabupaten/kota secara daring. Selain itu, hadir pula perwakilan Tim Penggerak PKK, DWP Provinsi Sultra, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sultra, distributor pangan, serta masyarakat umum.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sultra, Ir. Ari Sismanto, menyatakan bahwa GPM menjadi bagian dari aksi 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur ASR-Hugua. "Tujuan utama program ini adalah menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, mengendalikan inflasi daerah, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Harga yang ditawarkan lebih murah dibandingkan harga pasar, sehingga masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau," ujarnya.

Berdasarkan data inflasi Sultra per Februari 2025, tercatat inflasi sebesar 0,22% Year on Year (YoY), lebih rendah dibandingkan Januari 2025 yang mencapai 0,38%. Empat titik pengukuran inflasi menunjukkan variasi angka, yakni Kota Kendari (0,06% YoY), Kota Baubau (0,08% YoY), Kabupaten Konawe (-1,54% YoY), dan Kabupaten Kolaka (0,16% YoY). Angka ini masih di bawah rata-rata nasional

yang mencapai 0,76% YoY.



Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional RI, Maino Dwi Hartono, menegaskan bahwa GPM adalah langkah strategis nasional dalam menjaga ketersediaan pangan dan menekan fluktuasi harga. “Secara nasional, ada sekitar 1.600 titik pelaksanaan GPM di berbagai daerah. Sulawesi Tenggara sendiri telah melaksanakan GPM sebanyak 66 kali dalam berbagai kesempatan. Selain itu, operasi pangan murah juga digelar di seluruh kantor pos di Indonesia, termasuk 49 titik di Sultra, sejak 24 Februari hingga 29 Maret 2025,” katanya.

Wakil Gubernur Sultra, Ir. Hugua, M.Lig, mengapresiasi kolaborasi berbagai pihak dalam menyukseskan program ini. “Gerakan Pangan Murah adalah wujud kepedulian pemerintah dalam memastikan bahan pangan berkualitas tersedia dengan harga terjangkau, terutama menjelang Ramadhan dan Idul Fitri. Saya mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam berbelanja serta tidak melakukan penimbunan bahan pangan,” ujarnya.

Hugua juga memastikan bahwa ketersediaan pangan di Sultra dalam kondisi aman. “Saat ini stok pangan cukup untuk tiga bulan ke depan. Panen raya akan berlangsung pada April-Mei, sehingga ketersediaan pangan tetap terjaga. Saya juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan lahan kosong dengan

menanam komoditas pangan bernilai ekonomi guna mendukung ketahanan pangan daerah,” tambahnya.

GPM di Sultra berlangsung selama lima hari, mulai 19 hingga 23 Maret 2025. Program ini berkolaborasi dengan Bank Indonesia, Badan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Dinas Perkebunan dan Hortikultura, serta Dinas ESDM yang turut menjual gas elpiji 3 kg dengan harga terjangkau. Selain itu, Bank Indonesia juga menghadirkan layanan penukaran uang rupiah untuk mendukung kesiapan masyarakat menyambut Idul Fitri.

Kegiatan ini ditutup dengan pemantauan kesiapan GPM di 17 kabupaten/kota secara virtual oleh Wakil Gubernur Sultra, serta peninjauan langsung lokasi GPM di Kendari. Diharapkan dengan adanya program ini, masyarakat Sultra dapat menikmati bahan pangan berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau serta turut menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Mushaf Nusantara Gaungkan Literasi dan Budaya Islam di Sultra

Kendari, SultraNet.com - Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sekaligus Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ), Drs. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., menghadiri secara virtual kegiatan Penulisan Mushaf Nusantara yang digelar serentak di 29 provinsi di Indonesia melalui aplikasi Zoom, Rabu, 19 Maret 2025.

Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Semarak Ramadan yang diinisiasi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Tujuannya adalah memperkuat literasi baca-tulis Al-Qur'an sekaligus melestarikan seni dan budaya Islam khas Nusantara.

Direktur Penerangan Agama Islam Kemenag RI, Ahmat Zayadi, M.Pd., yang juga

menjabat Sekretaris MTQ Nasional, dalam pemaparannya menegaskan bahwa program ini lebih dari sekadar penulisan mushaf.

“Kegiatan ini bukan hanya menulis mushaf, tetapi juga memperkuat ekosistem pendidikan Al-Qur’an di Indonesia. Dengan melibatkan para juara MTQ, kita ingin memastikan bahwa Al-Qur’an bukan hanya dibaca, tetapi juga ditulis dan dipahami dengan baik oleh masyarakat luas,” katanya.

Ia juga menjelaskan bahwa Mushaf Nusantara memiliki dimensi seni dan budaya yang kuat. Dalam proses penulisannya, mushaf dihiasi iluminasi dan ragam hias kaligrafi yang menggambarkan kekayaan seni Islam di tanah air. Menurutnya, penggunaan aksara Arab Jawi, Arab Pegon, dan Arab Melayu menjadi bagian penting dalam pelestarian identitas literasi Islam Indonesia.

“Ke depan, kita ingin Mushaf Nusantara tidak hanya dikenal dari segi isinya, tetapi juga dari segi seni dan budaya yang menjadi bagian dari identitas Islam di Indonesia. Inilah bentuk nyata bagaimana agama dan budaya bisa berjalan seiring dalam membangun peradaban yang lebih maju,” ujar Ahmat Zayadi.

Di Provinsi Sulawesi Tenggara, pelaksanaan kegiatan ini juga disambut antusias. Sebanyak delapan peserta dari berbagai kabupaten ambil bagian dalam proses penulisan Mushaf Nusantara. Kepala Kanwil Kemenag Sultra, H. Muhamad Saleh, yang turut hadir secara virtual, menyampaikan bahwa progres penulisan berjalan baik berkat kolaborasi antara LPTQ, Kemenag, serta para pegiat kaligrafi Islam lokal.

“Kegiatan ini mencerminkan komitmen bersama dalam mengembangkan tradisi keislaman yang berakar kuat pada budaya lokal,” kata Muhamad Saleh.

Pada kesempatan yang sama, Sekda Sultra Drs. Asrun Lio turut menyerahkan penghargaan kepada peserta terbaik dari Sulawesi Tenggara yang berprestasi dalam ajang MTQ VIII Korpri Tingkat Nasional 2024 di Kalimantan Tengah. Penyerahan dilakukan secara simbolis sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan prestasi para qari dan qariah asal Sultra.

Berikut daftar peserta terbaik Sultra:

- Lalu Suharja Hambali, S.Pd.I., M.Pd. - Juara I Cabang Hifzh Al-Qur’an Golongan Surah An-Nisa (Dinas Pendidikan Kota Baubau)

- Dr. Danial, Lc., M.Th.I. - Juara I Cabang Dakwah Al-Qur'an Kategori Da'i (IAIN Kendari)
- Sitti Syahali, S.Pd. - Harapan III Cabang Dakwah Al-Qur'an Kategori Da'iyah (Pemda Buton Utara)
- H. Syafuddin Mustaming, S.Ag., MA - Juara III Cabang Khutbah Jumat (Kantor Kesra Pemda Kolaka)
- Syamsu Alam - Harapan I Cabang Hifzh Al-Qur'an Golongan 7 Surah Pilihan (Kemenag Kolaka Utara)

Asrun Lio menyampaikan apresiasi atas kiprah peserta MTQ asal Sultra yang telah mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Ia juga berharap kegiatan Mushaf Nusantara bisa memperkuat identitas keislaman yang selaras dengan budaya lokal.

"Al-Qur'an bukan hanya menjadi bacaan, tetapi juga warisan budaya yang harus dijaga bersama. Lewat kegiatan ini, kita bisa melihat bagaimana Islam tumbuh bersama budaya kita sendiri," ungkap Asrun Lio.

Penulisan Mushaf Nusantara menjadi ruang pengabdian baru bagi umat Islam di Indonesia, di mana seni, budaya, dan nilai keagamaan bisa menyatu dalam harmoni. Inisiatif ini juga menjadi momentum penting untuk menghidupkan kembali literasi Islam yang tidak sekadar tekstual, tetapi juga visual dan artistik.

Program ini turut menumbuhkan semangat generasi muda untuk tidak hanya mencintai Al-Qur'an, tetapi juga mewarisinya melalui medium seni. Pemerintah berharap kolaborasi ini bisa menjadi fondasi kuat dalam membangun ekosistem Qur'ani yang inklusif, berbudaya, dan membumi.